

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwasanya keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang didalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri yang bisa dinilai dan dilihat dengan uang terhitung dengan adanya segala sesuatu yang berbentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah itu sendiri. Keuangan daerah itu sendiri harus dikeola salah satunya ialah efektif, maksud dari efektif dan Keuangan daerah itu sendiri dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD itu sendiri mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam mengelola keuangan daerah itu sendiri yang harus dilaksanakan dengan optimal dengan cara selalu melaporkan kegiatan serta transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerjanya dengan cara membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk disajikan oleh satuan kerja karena laporan keuangan itu sendiri yang akan menggambarkan kinerja pada satuan kerja tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Nomor 64 Tahun 2013.

Anggaran merupakan suatu alat pemerintah daerah untuk memberikan arahan dan memberikan jaminan kesinambungan atas pembangunan dan juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih bebas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada tidak mendukung atau terbatas.

Anggaran sangat diperlukan karena terdapat masalah keterbatasan pada sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*. Dan perlu diketahui juga bahwasanya anggaran dibutuhkan guna meyakinkan masyarakat bahwasanya pemerintah sendiri sudah bertanggung jawab akan rakyatnya sendiri. Maka dari itu anggaran ialah suatu instrument pertanggung jawaban publik oleh lembaga-lembaga publik itu sendiri. Anggaran juga merupakan suatu elemen yang menjabarkan keadaan keuangan dalam suatu instansi diantaranya ialah tentang pendapatan, belanja, dan aktivitas suatu instansi.

Dewasa ini belanja pada lazimnya digunakan pada sektor pemerintahan atau sektor politik dalam hal penganggaran, yaitu dengan memperlihatkan jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan selama satu periode (satu tahun), anggaran belanja itu sendiri diakui saat berlangsungnya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah. Belanja merupakan suatu pengurangan ekuitas dana lancar suatu pemerintahan yang dapat mengeluarkan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran. Dalam manajemen anggaran itu sendiri, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan apabila barang atau jasa yang sudah dibeli telah diterima oleh sector pemerintah. Yang sudah kita ketahui bahwasanya belanja pada pemerintah dapat terbagi menjadi dua bagian diantara lain yaitu belanja secara langsung dan belanja secara tidak langsung. anggaran belana merupakan suatu rencana, yang memiliki perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Dan setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang khusus tentang apa-apa yang akan direncanakan untuk

dilakukan oleh unit/organisasi yang menyusun anggaran belanja tersebut pada periode waktu yang akan datang.

Efektivitas itu sendiri merupakan suatu hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sasaran yang akan dicapai. Jika kegiatan operasional dapat dikatakan efektif maka dalam melakukan proses suatu kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dengan itu dapat dianalogikan bahwasanya apabila suatu badan pemerintahan daerah jika ingin dikatakan anggaran yang di operasionalkan efektif maka pada laporan realisasi anggaran pada SKPD tersebut harus sesuai dengan apa yang telah dianggarkan, salah satunya pada elemen laporan realisasi anggaran yaitu belanja.

Menurut Pikiran Rakyat.com (yang diakses pada 25 Feb, 2020 pukul 15:00) bahwasanya Di Jawa Barat, anggaran untuk daerah sendiri hampir 50% nya dihabiskan untuk biaya pendidikan, Iwa Karniwa sebagai sekretaris daerah mengemukakan bahwa berdasarkan Raperda APBD 2019 yang telah dievaluasi Kemendagri, anggaran APBD untuk fungsi pendidikan 2019 yaitu 43,45%. (Rakyat, 2018).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perwal Kota Nomor 855 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung mempunyai tugas

pokok melaksanakan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.

Salah satu fungsi dari BKPP yaitu Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Evaluasi dan pelaporan ini salah satunya melalui laporan realisasi anggaran Berdasarkan hasil dari observasi awal terdapat laporan anggaran belanja beserta realisasinya pada tahun 2015-2018, yang mana pada data tersebut presentase anggaran belanja tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Didalam akuntansi sektor publik terutama pada elemen belanja, didalam realisasinya lebih dari anggaran yang ditentukan maka disebut dengan inefisiensi dan jika realisasinya kurang maka dikatakan tidak efektif. Dengan itu berdasarkan data awal dari observasi awal pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung selama empat tahun anggaran yaitu 2015-2018 terdapat temuan selisih antara anggaran dan realisasinya,. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Presentasi Pencapaian
2015	34.661.236.647.52	30.245.276.270.00	87,26%
2016	36.511.472.515,00	32.108.584.383,00	87,94%
2017	34.362.822.347,00	31.843.783.710,00	92,67%

2018	83.526.926.027,36	64.081.789.960,00	76,72%
2019	102.125.711.862,26	65.659.219.355,00	64,29%

Sumber: LRA BKPP Kota Bandung Tahun 2015-2109

Dari data diatas dapat kita lihat bahwasanya elemen pada laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengalami naik turun dalam presentasi pencapaian realisasi anggaran. Kita bisa lihat pada tahun 2015 realisasi anggaran belanja mencapai 87,26% dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu mencapai presntase 87,94%. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup jauh yaitu mencapai presentase 92,67%. Namun pada tahun 2018 anggaran belanja mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menurun pada presentase 76,72%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan mencapai presentase 64,29%. Karena hal tersebut bahwasanya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung belum bisa merealisasikan anggaran dengan baik pada setiap tahunnya. Sesuai wawancara awal yang mana narasumber dari BKPP itu sendiri ialah Kepala Sub Bagian Keuangan menjelaskan penyebab naik turunnya realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung ialah adanya perbedaan antara formasi yang ditargetkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan BKPP itu sendiri tidak bisa mengurangi anggaran perencanaan tersebut karena ditakutkan adanya kekurangan anggaran saat proses perealisasiian yang mana sukar untuk dapat menambahkan anggaran. seperti adanya perencanaan penerimaan CPNS, yang mana diawal tahun misalnya

diadakan penerimaan CPNS untuk seribu orang, akan tetapi dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) memberikan kuota sebanyak 800 orang. Sedangkan untuk biaya satu orang CPNS itu 10.000.000 (sepuluh juta), dari seribu orang yang diserap hanya delapan ratus orang. Maka dipastikan biaya kelebihan pada instansi ini sebanyak dua miliar. Hal itulah yang dapat menyebabkan anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Dalam menentukan anggaran tampak belum tepat dikarenakan realisasi yang angkanya cukup jauh dengan anggaran belanja yang telah ditentukan. Sehingga hasil atau output nya pun kurang tepat. Dan dampak atau outcome yang terjadi menjadikan setiap kegiatan yang telah terselenggara belum bisa terlaksana secara maksimal.

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwasanya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dapat dikatakan belum efektif dikarenakan realisasi belanjanya kurang dari target yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 3 Ayat 2, bahwa penyerapan anggaran belanja paling sedikit yaitu sebesar 95%.

Penelitian ini penting dilakukan, mengingat bahwa realisasi yang telah dicapai oleh instansi ini sangatlah rendah perlu diketahui mengapa ini bisa terus terjadi, padahal fasilitas ataupun aturan yang berlaku mengenai pengelolaab dana sudah jelas termaktub dalam pengimplementasiannya pun masih banyak kendala-

kendala yang sebenarnya bisa diperbaiki untuk memaksimalkan realisasi anggaran tiap tahunnya. Dan alasan penting lainnya ialah jika peneliti melakukan penelitian ini maka BKPP dapat melakukan evaluasi supaya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Periode 2015-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas yang diperoleh dari data Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun anggaran 2015-2019, dengan itu penulis membatasi masalah yaitu:

1. Adanya penurunan dan kenaikan yang tidak stabil di realisasi anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung tahun 2015-2019.
2. Kurang optimalnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dalam merealisasikan anggaran belanja pada tahun 2015-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana output efektivitas anggaran belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2015-2019?
2. Bagaimana outcome efektivitas anggaran belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2015-2019?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui output efektivitas anggaran belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui outcome efektivitas anggaran belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tahun 2015-2019

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Karena hal itu merupakan suatu keharusan sebuah penelitian untuk memiliki manfaat. maka dengan itu manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan suatu hal yang baru baik itu informasi dan pengetahuan yang nantinya akan menjadi acuan menilai Efektivitas anggaran belanja dalam perhitungan rasio efektivitas.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Badan Pemerintahan Daerah

Dengan Penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan ukuran sejauh mana Tingkat Efektivitas anggaran belanja pada Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan selama 4 tahun, sehingga dengan itu BKPP dapat terpacu untuk lebih meningkatkan kinerja pada anggaran belanjanya.

B. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang transparansi bagi masyarakat mengenai anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

C. Bagi Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian kedepannya yang berhubungan dengan akuntansi sector publik.

D. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti terbantu untuk dapat menyelesaikan dan memenuhi tugas akhir dan dapat membagi pengetahuan bagaimana cara menghitung rasio efektivitas dengan cara menghitung anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

1. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep kerangka pemikiran yang diawali dengan *Grand Theory* yaitu Administrasi Publik, kemudian *Middle Theory* yaitu Keuangan Daerah dan *Operational Theory* yaitu Efektivitas.

Menurut (Henry dalam Pasolong, 2013) mendefinisikan administrasi publik adalah Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih

responsive terhadap kebutuhan social. Administrasi public berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efesiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.” (Pasolong, 2017)

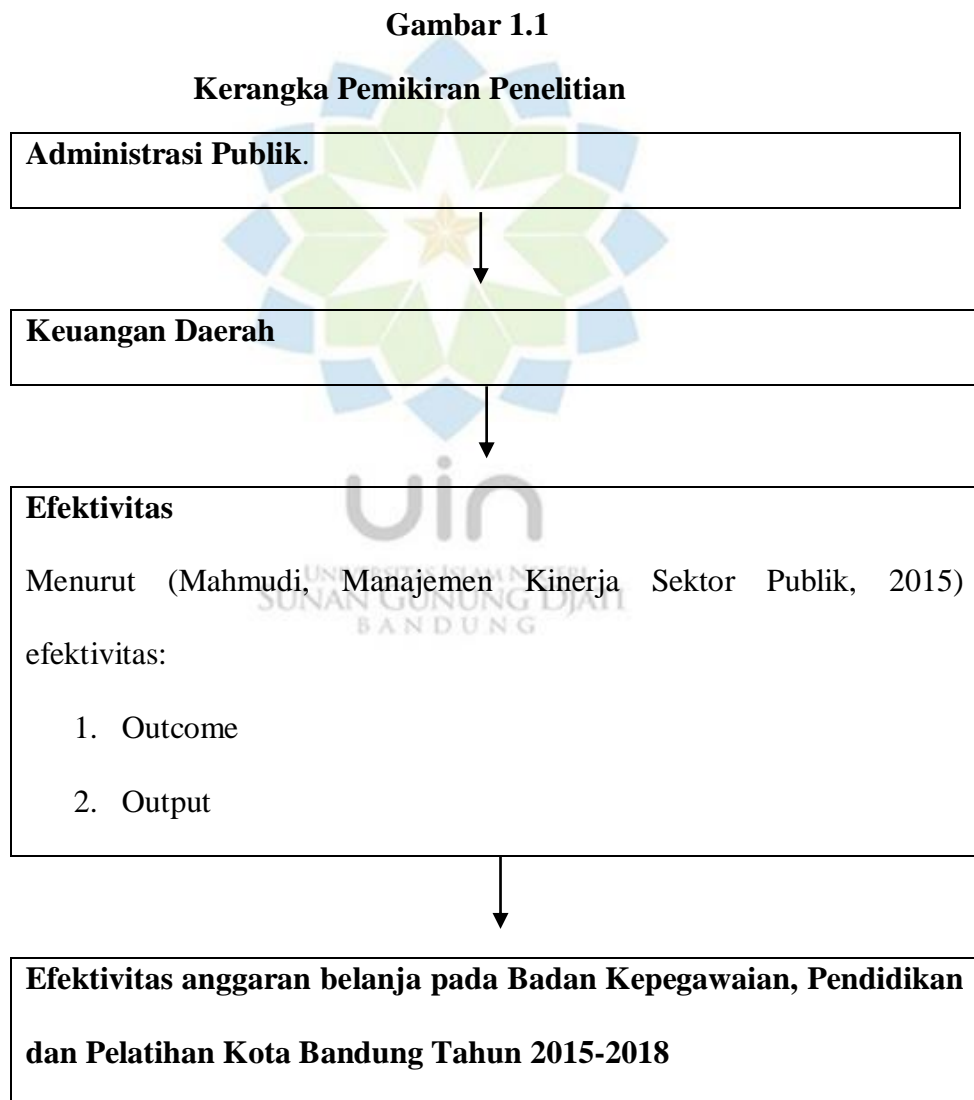
Menurut (Suwanda, 2016) keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Efektivitas merupakan adanya berkaitan antara output dengan tujuan. Yang mana jika ouput berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan organisasi maka semakin besar pula efektif pada organisasi itu sendiri. (Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 2017)

Berbicara mengenai efektivitas sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi. Untuk bisa mengetahui hal apa yang membuat efektivitas anggaran belanja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung, maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah output dan tujuan yang telah ditentukan berjalan baik atau tidak. Efektif atau tidaknya suatu organisasi dapat diketahui dari output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Sama halnya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan demikian untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini, penulis pengacu pada teori yang telah dikemukakan oleh Mahmudi,2015 yaitu outcome dan output.

Jadi untuk melihat efektif atau tidaknya anggaran belanja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung maka kedua dimensi inilah yang dapat mengukur apakah efektif atau tidaknya anggaran belanja pada organisasi tersebut.

Selanjutnya untuk lebih jelas terdapat skema kerangka pemikiran yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini.



2. Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini bahwa Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung tahun 2015-2019 berkaitan dengan outcome dan output.

